

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatannya secara optimal merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pembelajaran. Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana, pada penyelenggaraan SMP di Kota Singkawang terdapat beberapa sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri sehingga pembelajaran dilakukan secara bergantian dengan satuan pendidikan lain. Berdasarkan kualitas ketersediaannya, sebagian besar sekolah memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai atau kurang memadai terutama menyangkut ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagian besar SMP di Kota Singkawang belum memenuhi pelayanan minimum maupun standar sarana dan prasarana.
2. Ketersediaan pendidik yang kompeten dan profesional sangat menentukan kualitas pengelolaan pembelajaran, interaksinya dengan peserta didik merupakan indikator utama yang menentukan kualitas layanan pembelajaran. Pada penyelenggaraan SMP di Kota Singkawang, ketersediaan pendidik baik dari pemenuhan kualifikasi pendidikan maupun dimensi profesionalnya masih rendah. Berdasarkan pemenuhan kualifikasi pendidikan, sebagian besar sekolah masih dalam kategori memenuhi standar pelayanan minimal dengan

70% guru memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4. Ketersediaan pendidik yang profesional ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pendidik, terkait dengan hal tersebut diperoleh bahwa sebagian besar sekolah belum memenuhi standar pelayanan minimal. Secara keseluruhan, sebagian besar SMP di Kota Singkawang belum memenuhi ketersediaan pendidik dalam perpektif pemenuhan standar pelayanan minimal dan standar pendidik.

3. Penjaminan mutu pendidikan secara umum telah diterapkan dengan cukup efektif oleh sebagian besar sekolah, hanya sebagian kecil sekolah yang kurang efektif. Permasalahan umum yang terjadi adalah konsistensi dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan yang terlihat dari penerapan komponen-komponen penjaminan mutu pendidikan. Penerapan penjaminan mutu yang tidak konsisten berimplikasi pada hasil pembelajaran yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi. Kenyataan ini bertentangan dengan prinsip penjaminan mutu pendidikan sehingga penjaminan mutu pendidikan sebagai upaya yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan belum dapat diwujudkan.
4. Mutu hasil pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dipengaruhi oleh mutu hasil pembelajaran, baik dalam bentuk kemampuan kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Mutu pembelajaran ditunjukkan melalui tingkat ketercapaian kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran sebagai acuan mutu sekolah. Terkait dengan ketercapaian kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran diperoleh bahwa sebagian besar sekolah tidak mampu memenuhi acuan mutu yang ditetapkan, hal ini ditunjukkan melalui tingkat ketercapaian KKM mata pelajaran pada setiap mata pelajaran. Salah satu faktor yang menyebabkan

ketidakmampuan sekolah dalam memenuhi kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran adalah penetapan acuan mutu yang tidak akurat dan tidak selaras dengan daya dukung sekolah. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran antar sekolah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan merupakan salah satu indikator lemahnya perencanaan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran.

5. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah memberikan kontribusi yang besar terhadap efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas prasana dan prasarana, dan pendidik memberikan pengaruh nyata terhadap efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan. Secara individual, ketersediaan sarana dan prasarana memberikan pengaruh yang lebih tinggi daripada ketersediaan pendidik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan pendidik berdasarkan indikator kualifikasi pendidikan dan kepemilikan sertifikat pendidik belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan SMP di Kota Singkawang, ketersediaan pendidik berdasarkan indikator-indikator kualifikasi pendidikan dan kepemilikan sertifikat pendidik kurang relevan terhadap implementasi penjaminan mutu pendidikan, hal ini disebabkan varian ketersediaan pendidik berdasarkan indikator tersebut sangat rendah serta beberapa faktor lain, diantaranya disparitas ketersediaan pendidik yang tinggi, ketersediaan pendidik tidak selaras dengan indikator input sekolah lainnya seperti kualifikasi pendidikan

dan kompetensi kepala sekolah, serta dukungan penyelenggara satuan pendidikan.

6. Ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan pendidik, dan implementasi penjaminan mutu pendidikan yang efektif memberikan kontribusi yang kuat terhadap mutu hasil pendidikan. Hal tersebut diperlihatkan melalui kontribusi ketiga variabel tersebut terhadap tingkat ketercapaian KKM masing-masing mata pelajaran. Dari ketiga variabel tersebut, efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana memberikan kontribusi yang lebih besar dan signifikan terhadap tingkat ketercapaian kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Sedangkan ketersediaan pendidik berdasarkan indikator yang diukur ternyata tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat ketercapaian kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Sejalan dengan pernyataan diatas, efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan dan tingkat ketercapaian kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, sedangkan ketersediaan pendidik berdasarkan indikator kualifikasi pendidikan dan kepemilikan sertifikat pendidik belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan serta tingkat ketercapaian kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama di Kota Singkawang.

B. Rekomendasi

1. Sarana dan prasarana sekolah sebagai media penyelenggaraan pendidikan, khususnya pembelajaran merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penerapan penjaminan mutu dan mutu hasil pendidikan melalui ketercapaian kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Oleh karena itu, sejalan dengan konteks penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagai bagian dari program wajib belajar, penyelenggara pendidikan harus menyusun rencana strategi dan sistematis dalam memenuhi standar pelayanan minimum dan standar nasional pendidikan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pendidik berdasarkan indikator kualifikasi pendidikan, kepemilikan sertifikat, dan status kepegawaian guru belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan dan tingkat ketercapaian kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Kenyataan ini terkait dengan distribusi guru secara keseluruhan dan proporsinya berdasarkan indikator tersebut, kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, dan dukungan penyelenggara pendidikan terhadap satuan pendidikan. Dipihak lain, ketersediaan pendidik merupakan prasyarat awal dan penentu keberhasilan pembelajaran dan pendidikan secara umum. Sehingga untuk kajian lebih lanjut indikator ketersediaan pendidik berdasarkan kompetensi dan pengalaman kerja perlu dilakukan untuk mengidentifikasi indikator ketersediaan pendidik yang mempengaruhi efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan dan mutu hasil pendidikan.

3. Efektivitas implementasi penjaminan mutu pendidikan memberikan kontribusi yang besar terhadap tingkat ketercapaian Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran. Sehingga sekolah harus meningkatkan ketaatan dan konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu pendidikan. Terkait dengan penjaminan mutu sebagai kebijakan pemerintah, maka pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja penjaminan mutu di sekolah.
4. Hasil penelitian yang memperlihatkan tingkat ketercapaian kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran masih relatif rendah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran yang nyata antar sekolah belum menunjukkan perbedaan yang signifikan sesuai dengan kriteria penetapan KKM mata pelajaran yang berakibat pada rendahnya tingkat ketercapainya. Sehingga sekolah perlu melakukan kajian dan analisis mendalam dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Ketercapaian kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah merupakan salah satu wujud dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang terencana dan berkelanjutan sejalan dengan prinsip penjaminan mutu pendidikan.